



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya Kecamatan Astanaanyar dapat menyelesaikan Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi Laporan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung merupakan sarana pelaporan kinerja tahunan dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kota Bandung selama tahun 2020.



Selain itu, Laporan Capaian Indikator Kinerja Tahunan Tahun 2020 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Clean Government dan Good Governnace serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah baik dari dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (tiga) indikator Capaian Kinerja Tahunan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Capaian Kinerja 1 dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100.90%.
- Indikator Capaian Kinerja 2 dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100.00%
- Indikator Capaian Kinerja 3 dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 166.66%.
- Indikator Capaian Kinerja 4 dengan nilai rata-rata capaian kinerjanya sebesar 103.95%.



Hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) indikator Capaian Kinerja Tahunan tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang berarti rata-rata capaian kerjanya melebihi target yang telah diperjanjikan

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 21.873.930.319,64 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 19.960.709.995,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91.25%,

Akhir kata semoga Laporan Capaian Indikator Kinerja Tahunan Tahun 2020 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

**Bandung, Januari 2021**

**CAMAT ASTANAANYAR**

**Drs. SYUKUR SABAR**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19680904 199006 1 001**





## DAFTAR ISI



	<b>Perihal</b>	<b>Hal</b>
	Kata Pengantar .....	1
	Daftar Isi .....	4
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
	1.1. Latar Belakang .....	5
	1.2. Gambaran Umum Kecamatan .....	6
	1.3. Tugas dan Fungsi .....	16
	1.4. Isu Strategis .....	37
	1.5. Landasan Hukum .....	44
	1.6. Sistematika .....	45
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>47</b>
	2.1. Perencanaan Srategis .....	47
	2.1.1. Rencana Startegis .....	47
	1. Visi .....	48
	2. Misi .....	49
	3. Tujuan dan Sasaran .....	50
	4. Indikator Kinerja Utama .....	51
	5. Perjanjian Kinerja .....	58
	2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu .....	59
	A. Rencana Strategis Hasil Reviu .....	59
	B. Indikator Utama Hasil Reviu .....	60
	C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu .....	66
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>68</b>
	3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	69
	3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	71
	3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	73
	3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	104
	3.5. Prestasi dan Penghargaan .....	113
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>116</b>



## BAB I



# PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Astanaanyar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan

keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

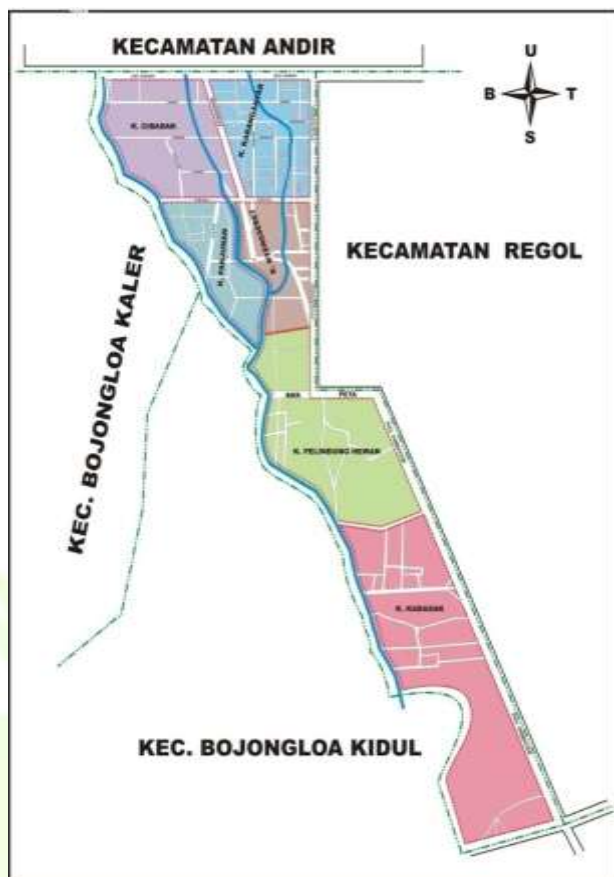
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Astanaanyar merupakan salah satu dari 30 kecamatan di kota Bandung, yang terletak di pusat kota dengan luas wilayah 287,868 hektar, dengan batas wilayah meliputi:

Sebelah Utara	: Kecamatan Andir
Sebelah Selatan	: Kecamatan Bojongloa Kidul
Sebelah Timur	: Kecamatan Regol
Sebelah Barat	: Kecamatan Bojongloa Kaler





Secara geografis Kecamatan Astanaanyar memiliki bentuk wilayah datar, dengan ketinggian tanah, berada pada ketinggian 700 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Astanaanyar berkisar 28°C dan 24°C, sedangkan dilihat dari segi curah hujan berkisar 2400 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 10 hari.

Kecamatan Astanaanyar mempunyai 6 kelurahan yang terdiri dari 47 RW serta 304 RT yang sebagian besar wilayah terdiri dari pemukiman dan pertokoan (jasa perdagangan), dengan rincian sebagai berikut :TABEL 1.1

JUMLAH DAN LUAS WILAYAH KELURAHAN

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Cibadak	47,368	9	76
2	Karanganyar	42,5	9	45
3	Nyengseret	38,0	7	47
4	Panjunan	39,0	6	32
5	Pelindung Hewan	65,5	10	59
6	Karasak	55,5	6	45
J U M L A H		287,868	47	304

Sumber : Kecamatan Astanaanyar, Tahun 2020



Kecamatan Astanaanyar yang terletak di tengah kota, dimana tingkat urbanisasi sangat tinggi terbukti dengan jumlah penduduk Kecamatan Astanaanyar pada bulan November Tahun 2020 sebanyak 67.648 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 34.134 jiwa dan perempuan sebanyak 33.514 jiwa, dengan jumlah 16.742 KK dan tingkat kepadatan penduduk 253/Ha

### 1. Sarana dan Prasarana

Prasarana perhubungan di wilayah Kecamatan Astanaanyar berupa jalan Negara sepanjang 6,6 Km, jalan Propinsi sepanjang 11,3 Km, jalan Kota sepanjang 22 Km, jalan arteri / penghubung sepanjang 22 Km, serta jalan/Gang sepanjang 126 Km.

#### a. Bidang Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Astanaanyar adalah sebagai berikut :

TABEL 1.2  
SARANA PENDIDIKAN DI KEC. ASTANAANYAR

Sarana Pendidikan	Jumlah
a. TK	22 Buah
b. SD Negeri	23 Buah
c. SD Swasta	6 Buah
d. SLB	1 Buah
e. SLTP Negeri	1 Buah
f. SLTP Swasta	6 Buah
g. SLTA Negeri	-
h. SLTA Swasta	9 Buah
i. Madrasah Ibtidaiyah	1 Buah
j. Madrasah Tsanawiyah	1 Buah
k. Madrasah Aliyah	1 Buah
l. Perguruan Tinggi Negeri	-
m. Perguruan Tinggi Swasta	-

Sumber : Kecamatan Astanaanyar, Tahun 2020



## b. Bidang Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Astanaanyar dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.3  
SARANA KESEHATAN DI KEC. ASTANAANYAR

Sarana Kesehatan	TAHUN		KETERANGAN
	2020	2019	
Sarana Kesehatan			
• Posyandu	71	71	
• Puskesmas	4	4	
• Balai Kesehatan	11	11	
• Rumah Sakit	1	1	
• Apotek	6	6	
• Dokter / Bidan Praktek	23	23	

Sumber : Kecamatan Astanaanyar, Tahun 2020

## c. Bidang Kemakmuran

Dalam mendukung LPE Kota Bandung sebesar 11%, Kecamatan Astanaanyar telah melakukan berbagai upaya baik dengan cara mengembangkan Home Industri maupun Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah serta adanya penciptaan lapangan kerja dengan berbagai usaha antara lain :

- Pembuatan kerajinan tas dan sepatu Elizabeth
- Kerajinan boneka kayu
- Pembuatan kompor dan alat dapur lainnya
- Makanan dan minuman (Cendol Elizabeth)
- Kerajinan cinderamata
- Usaha jasa ketok/cat mobil di Kelurahan Karasak
- Rintisan usaha percetakan oleh Pemuda Karang Taruna Kelurahan cibadak.

Perkembangan dana bergulir di Kecamatan Astanaanyar melalui program UP2K, MUBR, dan UBK dengan dana semula Rp.33.000.000,- sekarang telah berkembang menjadi Rp.132.000.000,-. Kemudian program P2KP dari awal sebesar Rp.1,3 Miliar sekarang telah mencapai Rp.3,2 Miliar. Program-program diatas adalah sangat mendukung dalam perkembangan dan penguatan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Kecamatan Astanaanyar.

TABEL 1.4  
 DATA ANGKATAN KERJA, BUKAN ANGKATAN KERJA  
 DAN JUMLAH PENGGANGURAN

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2018 (JIWA)	KET.
Penduduk Usia Kerja 15-55 tahun	1. Angkatan Kerja	35.963	
	2. Bukan Angkatan Kerja	17.762	
	3. Penduduk yang bekerja	33.450	
	4. Penganggur	1.837	

Sumber : Kecamatan Astanaanyar, Tahun 2020

**d. Bidang Lingkungan Hidup**

Sarana dan prasana lingkungan hidup yang terdapat di Kecamatan Astanaanyar seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.5  
 SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN HIDUP  
 KECAMATAN ASTANAANYAR

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Taman	
	a. Luas Taman	1.300 m2
	b. Banyaknya Taman	40 buah
	c. Jalur Hijau	300 m2
	d. Pohon pelindung/produktif	3510 buah
	e. Sumur resapan	116 buah



	f. Drum pori	90 buah
	g. Biopori	6829 buah
	<b>Kebersihan</b>	
	a. Lokasi TPS	4 Buah
	b. Volume Sampah	34 m <sup>3</sup>
	c. Sarana Angkutan Sampah	82 Buah
	d. Personil Kebersihan	89 Orang
	e. Sanitasi/Saluran Got	4.500 m

### **e. Seni Budaya**

Kegiatan dan Potensi Seni Budaya yang ada di Kecamatan Astanaanyar antara lain :

- Kelurahan Cibadak : Kacapi Suling, Upacara Adat, Pencak Silat.
- Kelurahan Nyengseret : Pencak Silat paguron Gajah Putih.
- Kelurahan Pelindung Hewan : Calung dan Debus.
- Kelurahan Karasak : Calung, Seni Ibing Pencak Silat, dan Reog.
- Vokal Group.
- Gedung Bersejarah Kediaman Ibu Inggit Garnasih dan Museum Sri Baduga.
- Makam para Bupati yang terletak di Kelurahan Karanganyar

Dalam Bidang Kesenian terdapat beberapa jenis sarana yang mendukung kemajuan Kesenian Kecamatan Astanaanyar yaitu :

- Reog : 3 Buah
- Calung : 2 Buah
- Angklung : 1 Buah
- Kliningan : 3 Buah
- Jaipongan : 4 Buah



TABEL 1.6  
POTENSI SENI BUDAYA  
KECAMATAN ASTANAANYAR

URAIAN	JUMLAH
a. Paduan Suara	3 Kelompok
b. Orkes Melayu	2 Perkumpulan
c. Kesenian Daerah	8 Perkumpulan
d. Band	2 Perkumpulan
e. Keroncong	1 Perkumpulan
f. Al Barzanzi	6 Perkumpulan
g. Wayang Kulit/Golek/Orang	1 Perkumpulan

**f. Bidang Olah Raga**

Kegiatan dan Potensi bidang Olah Raga di Kecamatan Astanaanyar antara lain:

1. Gedung Futsal : 5 buah
2. Gedung Bulu Tangkis dan Outdoor : 10 buah
3. Gedung Padepokan Pencak Silat : 2 buah
4. Sasana Tinju : 1 buah
5. Lapangan Basket dan Volley halaman sekolah : 4 buah
6. Bola Volley : 2 buah
7. Tennis Meja : 23 buah
8. Bilyard : 3 Buah

### g. Keagamaan

Berikut adalah tabel Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

TABE L 1.7.

DATA SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN

SARANA PERIBADATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1. Masjid /Majelis Ta'lim	102	Kegiatan Berjalan
2. Gereja	17	Kegiatan Berjalan
3. Kelenteng	3	Kegiatan Berjalan
4. Vihara	7	Kegiatan Berjalan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Astanaanyar dilaksanakan forum Rapat Koordinasi/Minggon setiap hari selasa yang dihadiri oleh para Lurah dan karyawan/i serta Dinas/Instansi Kecamatan Astanaanyar. Kegiatan ini diarahkan untuk :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kelurahan agar dalam penyelenggaraanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu mewujudkan :
  - a. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai suatu proses karena merupakan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup tradisional masyarakat Pedesaan/Perkotaan menuju masyarakat yang lebih maju dan mantap.

- b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai metoda, karena memperhatikan cara pembangunan yang mengusahakan agar masyarakat berkemampuan membangun dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
  - c. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai suatu program, karena dilihat dari semua kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di setiap Kelurahan dengan terselenggarakannya peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan berkoordinasi dengan para Kepala Sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Astanaanyar agar para siswa yang tidak mampu tetapi masih ingin melanjutkan pendidikannya dapat terus bersekolah, meningkatnya daya tampung siswa pendidikan menengah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Wajib Pendidikan menengah 12 (dua belas tahun Tahun di kalangan masyarakat Kelurahan serta meningkatkan kegiatan pendidikan luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan antara lain kepramukaan, latihan keterampilan dan kejar usaha dan sebagainya.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang berhubungan dengan perekonomian yang meliputi antara lain :
- a. Perdagangan  
Perdagangan sebagai hasil produksi makin berdayaguna sebagai akibat baiknya sarana, prasarana, dan pemasaran hasil produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Disamping itu dengan adanya program-program bantuan Pemerintah dalam hal pengembangan Usaha-Usaha Kecil terutama untuk membantu pendapatan ekonomi keluarga yaitu dengan adanya UPPKS, UBK, UP2K, PPUD, Bawaku Makmur, PNPM, P2KB.



b. Koperasi

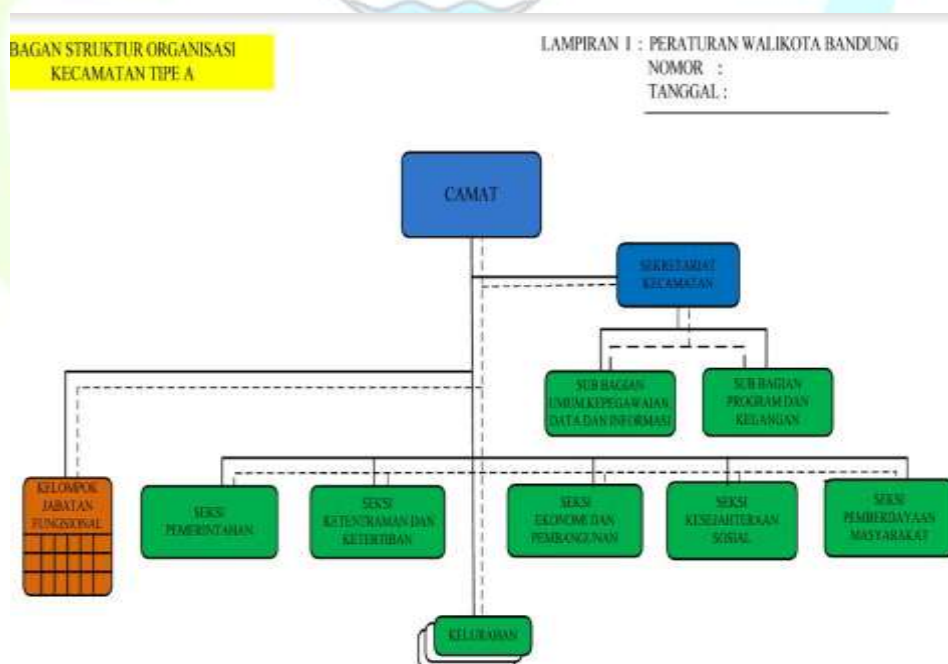
Kegiatan koperasi sangat membantu dalam perekonomian masyarakat Kelurahan dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) semakin meningkat disertai dengan peningkatan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti adanya pendidikan dan latihan serta penyegaran kembali bagi pengelola UED-SP, disamping itu adanya disiplin yang baik antara pengelola dengan anggota, sehingga UED-SP semakin bertambah dan modal yang di gulirkan semakin besar serta kegiatan berjalan semakin lancar. Disamping kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), juga adanya program pemerintah yaitu Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR) yang diperuntukan khusus untuk para remaja yang mempunyai usaha atau keinginan untuk membuka usaha, dimana mereka kekurangan serta membutuhkan modal untuk memajukan serta memulai usahanya. Pada tahun 2013 ini di Kecamatan Astanaanyar telah terbentuk Koperasi baru yaitu Ikhwatama Naratas dari PNPM dengan modal sebesar Rp.40.000.000,- yang bergerak di bidang simpan pinjam dan sosial, dan Warung Umat Bermartabat dari P2KB yang bergerak dalam grosir dan perdagangan umum.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih mengefektifkan pembinaan dan pengembangan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang pembinaan masyarakat dengan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketentraman di lingkungan penduduk dalam upaya meningkatkan kesadaran Bela Negara masyarakat makin meningkat dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungannya, meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Keamanan/Limnas sesuai dengan

kebutuhan. Disamping itu dengan adanya Siskamling Swakarsa di tingkat RT dan RW, sehingga pelaksanaan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban semakin mantap dan kekuatan rakyat terlatih serta terorganisir semakin terciptanya keamanan dan ketertiban dapat menunjang kelancaran pembangunan di segala aspek.

### 1.3 Tugas dan Fungsi

Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Walikota (perwal) Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. SYUKUR SABAR yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dengan eselon III-A, dengan membawahi:

1. Sekretariat Kecamatan (eselon III-B), membawahi 2 sub bagian dengan eselon IV-B yaitu Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi dan Sub Bagian Program dan Keuangan.
2. 5 (lima) orang kepala seksi dengan eselon IV-A yaitu : Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
3. 6 (enam) orang lurah dengan eselon IV-A, yaitu : Lurah Cibadak, Karanganyar, Nyengseret, Panjunan, Pelindung Hewan dan Karasak

Keadaan pegawai pada bulan Desember 2020 di Kecamatan Astanaanyar, adalah sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PERSONIL	ESELON				Fungsional Umum	JML
			IVB	IVA	IIIB	IIIA		
1	KECAMATAN	11	2	5	1	1	2	11
2	KEL. CIBADAK	10	4	1	0	0	5	10
3	KEL. KARANGANYAR	5	3	1	0	0	1	5
4	KEL. NYENGSERET	6	4	1	0	0	1	6
5	KEL. PANJUNAN	6	4	1	0	0	1	6
6	KEL. PEL. HEWAN	8	4	1	0	0	3	8
7	KEL. KARASAK	6	4	1	0	0	1	6
	J U M L A H	52	25	11	1	1	14	52

Sumber Kecamatan Astanaanyar 2020

Keadaan pegawai pada bulan Desember 2020 di Kecamatan Astanaanyar berdasarkan Golongan dan Tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut :





NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	JML	S D	SM P	SM A	DPL	S1	S2	JML
1	KECAMATAN	-	1	7	3	11	-	1	-	-	9	1	11
2	KEL. CIBADAK	-	-	10	-	10	-	-	1	-	8	1	10
3	KEL. KARANGANYAR	-	1	4	-	5	-	-	1	-	4	-	5
4	KEL. NYENGSERET	-	-	6	-	6	-	-	-	-	6	-	6
5	KEL. PANJUNAN	-	1	5	-	6	-	-	1	-	3	2	6
6	KEL. PEL. HEWAN	-	1	7	-	8	-	1	2	-	4	1	8
7	KEL. KARASAK	-	1	5	-	6	-	-	1	-	5	-	6
	J U M L A H	-	5	44	3	52	-	2	6	-	39	5	52

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### 1. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Camat mempunyai fungsi:
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;

- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretariat Kecamatan**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;



- e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasiserta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
- p. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- q. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- r. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- s. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- t. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- u. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- v. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- w. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- x. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;

- y. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
- ã. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- ä. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum, kepegawaian, data dan informasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;



- e. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;





- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
- s. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t. menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
- u. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- v. menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- w. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- x. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;



- y. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
- z. menyiapkan administrasipelayanan informasi publik;
- â. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- ä. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- ö. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- aa. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- bb. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- cc. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- dd. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- ee. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- ff. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- gg. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;

- hh. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ii. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Sub bagian Keuangan dan Program**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
  - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;





- f. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- g. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- h. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
- k. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- o. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;

- q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
- r. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
- s. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- t. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan;
- u. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

#### **5. Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;



- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- f. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
- g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- k. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
- l. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
- n. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;



- o. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
- q. melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketentraman dan ketertiban;
  - e. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan,



- koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
- f. menyusun data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;
  - g. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
  - h. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
  - i. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
  - k. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
  - l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
  - m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
  - n. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
  - o. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
  - p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
  - q. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;

- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
  - e. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
  - f. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - g. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;



- h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- l. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
- n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- o. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 8. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
  - e. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
  - f. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
  - g. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
  - h. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
  - j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
  - k. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;

- l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- n. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
- o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
- p. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;



- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- e. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
- j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
- k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;

- n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 1.4 Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau



sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan

kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

## **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan

kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Astanaanyar dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

Kuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam rangka mewujudkan good governance, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).



Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:

- a) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan
- b) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- c) Pengamanan barang daerah
- d) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah;

### 3. Janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.8  
**Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

No.	Misi	Indikator
1	Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Youth Space atau Pusat Kreativitas Pemuda. 2. Pojok Baca di Kelurahan, Kecamatan dan PD. 3. Perpustakaan Alun-alun. 4. Pameran Literasi. 5. Disiplin Menyerbang "Martial Art Traffic". 6. Pelatihan Tenaga Potong Ayam. 7. GESAT (Gerakan Salat Tepat Waktu). 8. Insentif Guru Madrasah.
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Efisien Bersih dan Melayani	1. Online LAMPID (Layanan Lahir, Mati, Pindah Datang, Pindah Keluar). 2. Gerai Pelayanan Disdukcapil 4 arah mata angin (MIM, PVJ, CIWALK, BTC). 3. Petugas Registrasi Kelurahan. 4. One Day Service Pelayanan Publik
3	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	1. Kampanye Perubahan paradigma Kumpul-Angkut-Buang menjadi Gerakan #KangPisMan (Kurangi Pisahkan Manfaatkan) #ZeroWasteLifeSyle. 2. Pembangunan Pusat Daur Ulang di Cicabe. 3. Pembuatan Instalasi2 pengolahan sampah skala medium dan TPS2 3R. 4. Perbanyak Bank Sampah Induk & Unit Sedekah Sampah. 5. Sidang Tipiring Pembuang Sampah Liar. 6. Sosialisasi Ulang Tempat Sampah di Kendaraan. 7. Aplikasi edukasi sampah 8. Konversi Angkot. 9. KIR Drive Thru. 10. Pekan Tarif TMB Gope. 11. 50 Sekolah Walk To School. 12. Penanaman Rumput Ajaib di Sungai. 13. Tebar Ikan di Sungai. 14. Angkat Sedimen. 15. Kolam Retensi. 16. Pembangunan Basement Air.
4	Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan	1. Peluncuran Puskesmas. 2. Pembentukan Pilot Koperasi Juara Kelurahan. 3. Pembentukan Satgas Rentenir. 4. ATM Beras. 5. Pembagian 1000 Tanaman Buah-buahan.

Sumber : Bappelitbang Kota Bandung 2018

## 1.5 Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



## 1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategical issue*) yang sedang dihadapi organisasi

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikstisar Perjanjian Kinerja sebelum dan setelah reviu

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



## BAB II



# PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Review**

#### **2.1.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Astanaanyar Kota Bandung Nomor 050/011-Kec.Anyar Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dibuat pada masa



jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “**Bandung Juara**”.



Visi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2019-2023 mengacu pada Misi Kota Bandung adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

**2. Misi**

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut *Kotler* bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung merumuskan dari 2 misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani**
- 2. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.**

Makna yang terkandung adalah untuk mewujudkan visi masih perlu ditingkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82,25	82,5	82,75	83
			Persentase temua BPK / Inspektorat yang	100	100	100	100	100



			ditindak lanjuti tepat waktu					
		Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50	50	66	88	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	54	59	71	83	100

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Astanaanyar Kota Bandung Nomor : 050/015-Kec. Anyar Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Astanaanyar adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Kelurahan Unggul
3. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan;

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan IKU/PK dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/ melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini :1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)- Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat- sistem2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)- Ada Kepengurusan- Gardu Sosial- Lumbung sosial- Peta Rawan Bencana- Melakukan



						<p>penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku dange; 30 exp-Koran2 / majalah langganan kelurahan- Ada laporan pengunjung4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah- petunjuk arah ke masjid- ada Pengingat/alm waktu sholat5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)- SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)- Data terpilah- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan</p>
--	--	--	--	--	--	--





						<p>evaluasi8. Septic Tank Komunal (Ekbang)- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)- Anggota Koperasi dange; 20 orang- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)Kriteria:a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulanb. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulanc. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwuland. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblase. Taman RW dalam kondisi bersih</p>
--	--	--	--	--	--	--



						tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting keringf. Melakukan penyiraman pada musim kemarau12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)- Ada Pengurus- Ada Anggota- Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif dibagi 3	% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi :Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPSKriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;2.



						<p>Balai RW/Markas Karang Taruna;3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;5. Gapura Kujang;6. Satu Kampung Satu Produk;7. Kampung Berkebun;8. Kampung Caang Baranang;9. MCK komunal;10. Pavingisasi11. Gerakan satu rumah satu tanaman;12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng13. Media Kampanye Kampung Unggul14. Satu Rumah satu jumantik15. Laporan RW tepat waktu minimal form A :1. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)1. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)2. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni1. RW berdaya-Ada kepengurusan-Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)- Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf% LKK UnggulKriteria LKK Aktif :1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/</p>
--	--	--	--	--	--	--





						<p>agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun% Siskamling RW AktifKriteria Siskamling Aktif :1. Adanya Pengurus; 2. Adanya Kelompok Siskamling; 3. Adanya Jadwal Siskamling; 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p>
--	--	--	--	--	--	--

### 2.1.3. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan tahun 2020 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,25
		Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100

2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	59

## 2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Astanaanyar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Tahun 2020, sebagai berikut :

### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Astanaanyar terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Tahun 2020

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Astanaanyar di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :



Berdasarkan hasil rewiu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Rewiu**  
**Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	82,25	82,5	82,75	83
			Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	66	88	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	54	59	71	83	100

**B. Indikator Utama Hasil Rewiu**

Bersamaan dengan rewiu rencana strategis juga dilakukan rewiu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Astanaanyar serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Astanaanyar hasil rewiu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

**Tabel 2.5**

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator  
 Kinerja Hasil Reviu**

**Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan IKU/PK dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan		Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan		Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/ melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat - sistem 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana 3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim



						<p>pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku dange; 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 4. Gerakan menyemarakan tempat ibadah - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat/alrm waktu sholat 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 8. Septik Tank Komunal (Ekbang) - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang</p>
--	--	--	--	--	--	---





						<p>berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang) - Anggota Koperasi dange; 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambles e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau 12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada</p>
--	--	--	--	--	--	---

						Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kewilayahan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif dibagi 3	% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi : Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini : 1. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 2. Balai RW/Markas Karang Taruna; 3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll) 4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 5. Gapura Kujang; 6. Satu Kampung Satu Produk; 7. Kampung Berkebun; 8. Kampung Caang Baranang; 9. MCK komunal; 10.



						<p>Pavingisasi 11. Gerakan satu rumah satu tanaman; 12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng 13. Media Kampanye Kampung Unggul 14. Satu Rumah satu jumantik 15. Laporan RW tepat waktu minimal form A :</p> <p>1. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) 1. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) 2. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</p> <p>1. RW berdaya - Ada kepengurusan - Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) - Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf % LKK Unggul Keriteria LKK Aktif : 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan ) 2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal</p>
--	--	--	--	--	--	---



						75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun % Siskamling RW Aktif Kriteria Siskamling Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
--	--	--	--	--	--	--

**C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Astanaanyar hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat Astanaanyar dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.25
		Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100



2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	59





## BAB III



# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Astanaanyar.



### 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru



Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung  
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Astanaanyar Kota Bandung Nomor : 050/015-Kec.Anyar tahun 2020, telah ditetapkan 3 (tiga)

sasaran dengan 4 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Astanaanyar kota Bandung Nomor : 050/015-Kec.Anyar tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan astanaanyar Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan



Astanaanyar Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung**  
**Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.25	82.991	100.90
2	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	83.33	166.66
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	59	61.33	103.95

*Sumber data Kecamatan Astanaanyar, 2020*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100.90 %, pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 166.66 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga dengan capaian kinerja 103.95 %
- Terdapat 1 capaian kinerja yang sesuai target yaitu Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu dengan capaian 100 %
- Tidak ada indikator kinerja di Kecamatan Astanaanyar yang capaian kerjanya tidak mencapai target

### 3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.25	82.991	100.90
2	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	83.33	166.66
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	59	61.33	103.95

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Astanaanyar pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**

**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00
2	Misi 2	1	1	25.00	0	0.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>75.00</b>	<b>1</b>	<b>25.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 3.5**

**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>3</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	66.67 %
2	Sesuai Target	1	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**

#### **Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	84.088	102.55	82.25	82.991	100.90
2	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu **Rata-rata nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dengan formulasi jumlah IKM Kecamatan dan Kelurahan dibagi jumlah sub unit ditambah 1 dan **Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti** dengan formulasi jumlah temuan dibagi dengan jumlah tindaklanjuti atas temuan tersebut.

### A. Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

- **Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) " adalah sebesar 82.991 dari target sebesar 82.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.90 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi	
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.25	82.991	100.90

- **Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) " tahun ini sebesar 82.991 dengan capaian kinerja sebesar 100.90% menurun 1.65 Point dari capaian tahun sebelumnya sebesar 84.088 dengan capaian mencapai 102.55. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Astanaanyar kepada masyarakat dibatasi seiring dengan program penanganan COVID-19 dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	84.088	102.55	82.25	82.991	100.90



- **Kinerja nyata dengan target akhir renstra.**

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) " tahun ini adalah sebesar 100.90 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Astanaanyar maka capaian kerjanya mencapai 99.99 %.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Renstra Tahun 2023	%
			Target	Realisasi			
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,25	82.991	102.55	83	99,99

- **Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.**

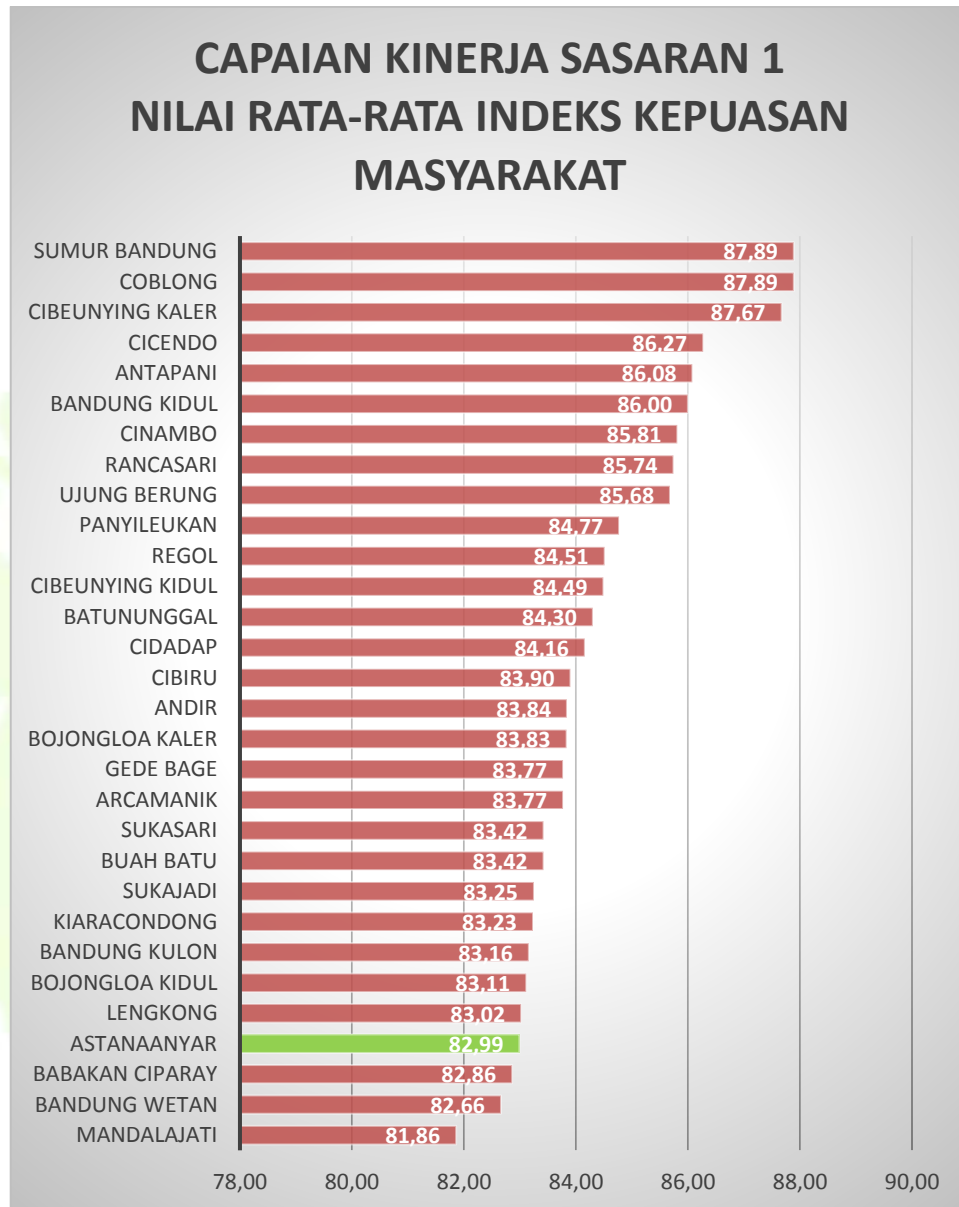
Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) " adalah sebesar 82.991 dari target sebesar 82.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.90 % tidak diperbandingkan dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta karena keterbatasan data dan waktu dalam penyusunan laporan.

- **Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) " adalah sebesar 82.991 bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Grafik 3.1

**Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung**



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Bandung yang tertinggi sebesar 87.89 pada Kecamatan Sumur Bandung dan terendah sebesar 81.86 pada Kecamatan Mandalajati. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Astanaanyar mendapat 82.991 (kategori sangat baik).

Adapun selisih nilai dengan nilai IKM terbesar (Kecamatan Sumur Bandung) adalah 4,899, sedangkan selisih nilai dengan Kecamatan yang memperoleh nilai IKM terkecil adalah 1.131 (Kecamatan Mandalajati).

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Data penunjang capaian kinerja indikator indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh berdasarkan hasil survey dilaksanakan oleh Tim dari Kecamatan Astanaanyar yang dilakukan secara acak terhadap masyarakat yang menikmati pelayanan di Kecamatan Astanaanyar yaitu masyarakat yang membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), SKM (Surat Keterangan Miskin), legalisasi, SKCK (Surat Keterangan Catatan kepolisian) dan Administrasi kependudukan lainnya dengan hasil sebagai berikut :







**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**KECAMATAN ASTANAANYAR**  
 Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

**Tabel 3.8**  
**Nilai Unsur Pelayanan dalam Penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan**  
**Di Kecamatan Astanaanyar**  
**Tahun 2020**

NO	UNSUR PELAYANAN	Realisasi Tahun 2020															
		Kec. Astanaanyar		Kel. Karasak		Kel. Nyengseret		Kel. Karanganyar		Kel. Panjunan		Kel. Cibadak		Kel. Pelindung Hewan		RATA-RATA	
		Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan	Nilai rata2 unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan
1	Persyaratan pelayanan	3.40	0.377	3.39	0.377	3.30	0.366	3.31	0.368	3.41	0.379	3.33	0.369	3.39	0.376	3.36	0.373
2	Kemudahan prosedur Pelayanan	3.30	0.366	3.45	0.383	3.35	0.372	3.34	0.371	3.28	0.364	3.41	0.378	3.41	0.379	3.36	0.373
3	Ketepatan Waktu pelayanan	3.23	0.358	3.00	0.333	3.35	0.372	3.33	0.369	3.35	0.371	3.28	0.364	3.39	0.377	3.28	0.363
4	Kewajaran biaya pelayanan	3.29	0.365	3.28	0.364	3.23	0.359	3.27	0.363	3.29	0.365	3.31	0.368	3.22	0.357	3.27	0.363
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.35	0.372	3.35	0.372	3.31	0.367	3.31	0.367	3.56	0.395	3.31	0.368	3.21	0.356	3.34	0.371



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**KECAMATAN ASTANAANYAR**  
 Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

6	<b>Kemampuan Petugas pelayanan</b>	3.41	0.379	3.26	0.362	3.25	0.361	3.27	0.363	3.23	0.358	3.33	0.370	3.25	0.360	3.29	0.365
7	<b>Kesopanan dan Keramahan Pelayanan</b>	3.31	0.368	3.31	0.368	3.34	0.371	3.29	0.365	3.37	0.374	3.31	0.367	3.36	0.373	3.33	0.365
8	<b>Kesesuaian maklumat pelayanan</b>	3.43	0.380	3.38	0.375	3.40	0.377	3.23	0.358	3.49	0.388	3.36	0.373	3.36	0.373	3.38	0.375
9	<b>Tata cara Pengaduan</b>	3.26	0.362	3.27	0.363	0.33	0.369	3.31	0.368	3.33	0.370	3.32	0.369	3.29	0.366	3.30	0.367
<b>Nilai Indeks</b>		<b>3.328</b>		<b>3.296</b>		<b>3.315</b>		<b>3,292</b>		<b>3.364</b>		<b>3.326</b>		<b>3.317</b>		<b>3.321</b>	
<b>IKM Unit Pelayanan</b>		<b>83.195</b>		<b>82.399</b>		<b>82.880</b>		<b>82,307</b>		<b>84.100</b>		<b>83,139</b>		<b>82.917</b>		<b>82.911</b>	
<b>Mutu Pelayanan</b>		<b>A</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>B</b>		<b>B</b>	
<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>		<b>Sangat Baik</b>		<b>Baik</b>		<b>Baik</b>		<b>Baik</b>		<b>Sangat Baik</b>		<b>Sangat Baik</b>		<b>Baik</b>		<b>BAIK</b>	
<b>Rata - Rata IKM Kecamatan Astanaanyar</b>										<b>82.991</b>							
<b>Rata Mutu Pelayanan Kecamatan Astanaanyar</b>										<b>B</b>							
<b>Rata - Rata Kinerja Unit Pelayanan Kecamatan Astanaanyar</b>										<b>Baik</b>							

**KREATIF RESPONSIF**  
**AGAMIS**  
**AMANAH TERTIB**

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata unsur pelayanan tertinggi diperoleh dari kesesuaian maklumat pelayanan dengan nilai indeks sebesar 3,38. Selain itu pada akhir tahun 2020, Kasi Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan telah berbagai macam produk yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yang dapat diterbitkan dan dilayani di Kecamatan Astanaanyar dan ditempatkan pada lokasi yang strategis sehingga mudah dibaca oleh warga masyarakat yang datang.

Variabel Penilaian yang dilakukan antara lain :

1. Sistem Pelayanan Terpadu yaitu pelayanan dilakukan dengan metode satu pintu hal tersebut dilakukan untuk menghindari para calo-calo pelayanan, jadi masyarakat bisa langsung bertemu dengan petugas pelayanan dan menyerahkan berkas pelayanan secara langsung dan mendapatkan penjelasan dari petugas pelayanan mengenai persyaratan dan prosedur untuk semua pelayanan;
2. Standar Pelayanan yaitu Dasar hukum jelas, persyaratan terpampang, kejelasan prosedur (SOP), kejelasan tarif (pelayanan gratis), Tata tertib, kode etik, papan nama petugas pelayanan, waktu pelayanan.
3. Menerapkan ISO 9001:2008.

Sedangkan nilai rata-rata unsur pelayanan terendah yaitu dan nilai rata-rata unsur pelayanan terendah diperoleh dari kewajaran biaya pelayanan dengan nilai indeks sebesar 3,27. Semua pelayanan yang di laksanakan di Kecamatan Astanaanyar sudah tidak berbiaya atau gratis. Masa pandemi yang membatasi semua pergerakan warga bisa menjadi salah satu fektor



pendukung warga harus mengeluarkan biaya ekstra pengantaran untuk mendapatkan sebuah produk pelayanan.

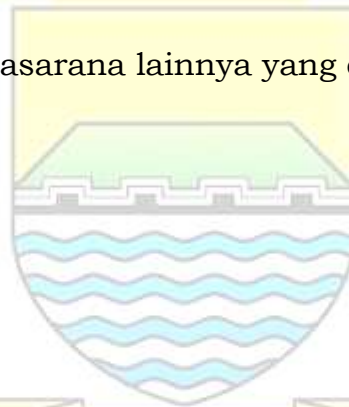
Selain itu pada akhir tahun 2020, Kecamatan Astanaanyar telah melakukan berbagai terobosan khususnya dibidang Ilmu dan Teknologi terutama yang berhubungan dengan pelayanan dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya dan melakukan pengantaran langsung ke konsumen atas KTP yang telah selesai diterbitkan.

Adapun perbaikan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Astanaanyar untuk mendongkrak nilai unsur yang masih rendah dibanding dengan unsur yang lainnya adalah :

1. Membuat sarana informasi lainnya bidang pelayanan sehingga masyarakat tahu tentang berbagai macam pelayanan yang ada di Kecamatan Astanaanyar beserta persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Mensosialisasi media sosial sebagai sarana komunikasi dengan warga masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan menjamin kepastian hasil pelayanan kepada warga;
3. Melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas tenaga pelayanan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan;
4. Melaksanakan monitoring pelayanan secara berkala, sehingga kita bisa secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Astanaanyar perlu mengadakan perbaikan-perbaikan pada nilai unsur-unsur yang masih kurang yaitu kenyamanan lingkungan dan keamanan lingkungan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan cara:

1. Menata ulang interior ruang pelayanan;
2. Pembaruan meubeulair untuk ruang tunggu di pelayanan;
3. Pemasangan AC di ruang pelayanan;
4. Pemasangan CCTV di ruang Pelayanan;
5. Piket petugas Trantib Kecamatan di depan ruang pelayanan dan pintu gerbang Kecamatan;
6. Sarana dan Prasarana lainnya yang diperlukan.



GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

**KERAMAT**  
**KREATIF RESPONSIF**  
**AGAMIS**  
**AMANAH TERTIB**

**B. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu.**

**- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.**

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi	
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.25	82.991	100.90

**- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.**

Capaian kinerja indikator 2 “Presentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti taprt Waktu” tahun ini adalah sebesar 100,00%, bila dibandingkan dengan target tahun sebelumnya Kecamatan Astanaanyar maka capaian kinerjanya sama dengan tahun 2019 yang mencapai 100,00.

Gambar 3.1. Hasil Kinerja tindak lanjut BPK dan Inspektorat



NO	TAHUN PEMERIKSAAN	URAIAN	BANYAKNYA	STATUS TINDAK LANJUT		
				DIKLAJUTI Jumlah	DIKLAJUTI Jumlah	BELUM DITINDAKLANJUTI Jumlah
I	TAHUN 2018	1. STATUS UJAP	4	4	0	0
		2. BAWAJIRAN SETOR	0	0	0	
II	TAHUN 2018	1. STATUS UJAP	0	0	0	
		2. BAWAJIRAN SETOR	0	11.440.890	11.440.890	
III	TAHUN 2019	1. STATUS UJAP	13	13	0	
		2. BAWAJIRAN SETOR	0	10.800.878	10.800.878	
IV	TAHUN 2019	1. STATUS UJAP	17	17	0	
		2. BAWAJIRAN SETOR	0	20.901.711	20.901.711	
V	TAHUN 2020	1. STATUS UJAP	0	0	0	
		2. BAWAJIRAN SETOR	0	0	0	
VI	TAHUN 2018	1. STATUS UJAP	0	0	0	
		2. BAWAJIRAN SETOR	0	100.000.000	100.000.000	
VII	TAHUN 2019	1. STATUS UJAP	0	0	0	
		2. BAWAJIRAN SETOR	0	1.000.000	1.000.000	
VIII	TAHUN 2020	1. STATUS UJAP	0	0	0	
		2. BAWAJIRAN SETOR	0	0	0	



Pada tahun 2020 ini, Kecamatan Astanaanyar secara konsisten dapat menindaklanjuti temuan inspektorat yang tergambar dari gambar 3.1. diatas.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00	50	83.33	166.66

**- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.**

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 2 “Presentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat Waktu” tahun ini adalah sebesar 100,00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Astanaanyar maka capaian kinerjanya mencapai 100,00.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Renstra Tahun 2023	%
			Target	Realisasi			
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,25	82.991	102.55	83	99,99

**- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.**

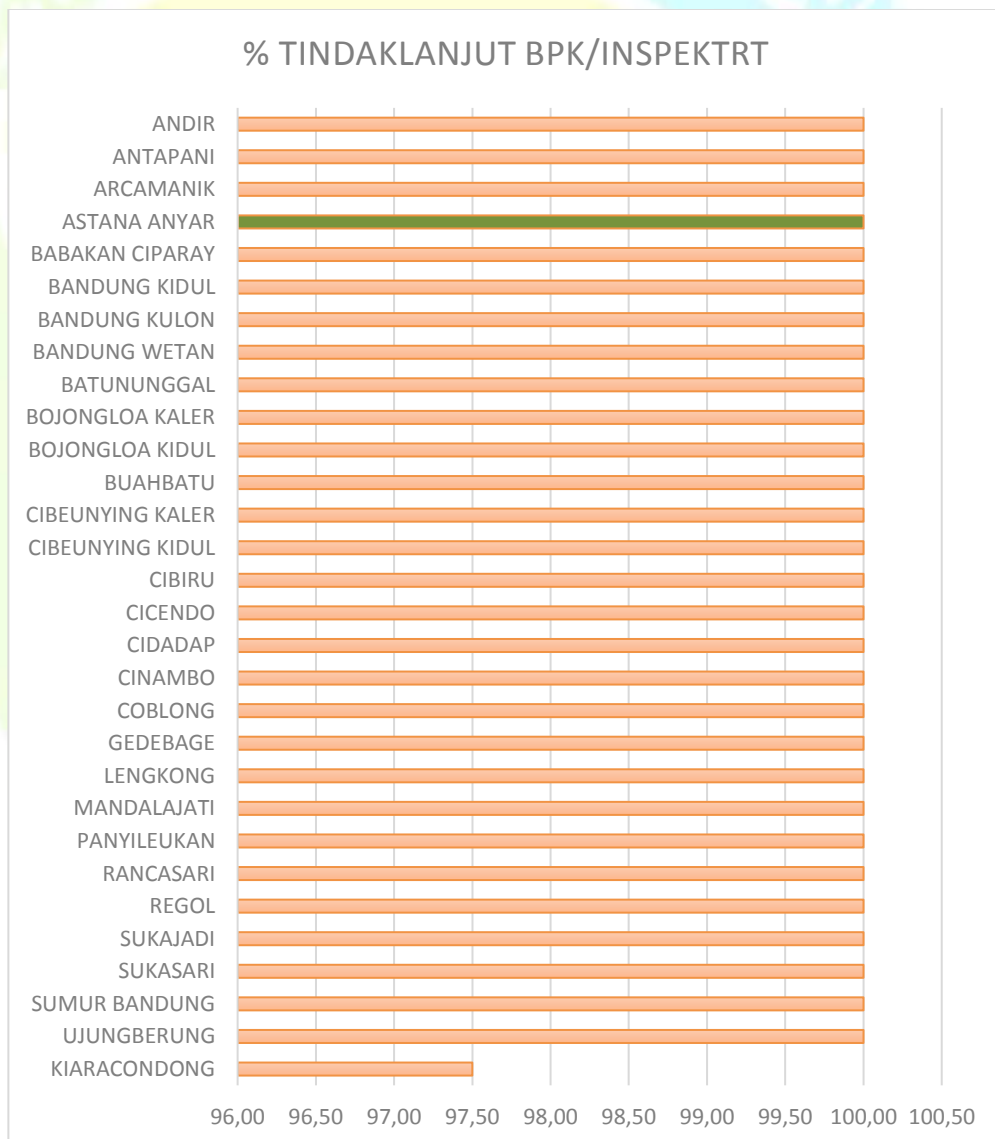
Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu " adalah sebesar 82.991 dari target sebesar 82.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.90 % tidak diperbandingkan dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta karena keterbatasan data dan waktu dalam penyusunan laporan.

- **Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.**

Adapun capaian kinerja nyata indikator "**Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu**" bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2

**Grafik Perbandingan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung**



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu di Kota Bandung sudah ditindaklanjuti seluruhnya oleh hampir semua Kecamatan di Kota Bandung, hanya ada satu Kecamatan yang Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu tidak 100% yaitu Kecamatan Kiara Condong

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat
2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Astananyar
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Astananyar

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah
2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat
3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Astananyar
4. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian;



Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal;
2. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Astanaanyar lebih ditingkatkan;
3. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian;
4. Penguatan Regulasi dan atau aturan ditetapkan lebih cepat dan dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir SOP, Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan public akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat;
5. Mengangkat seorang Pejabat Struktural untuk menjadi pejabat pengaduan, Informasi Prosedur tata cara pengaduan akan dibuat dan di pampang di ruang pelayanan

**- Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)  
Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya kebutuhan listrik, air, telepon, internet, STNK kendaraan dinas operasional, jasa kebersihan kantor, jasa pemeliharaan peralatan kantor, barang cetakan dan penggandaan, alat listrik dan penerangan kantor, alat dan bahan pembersih, makan dan minum rapat, tamu, biaya perjalanan dinas luar daerah;



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)  
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, peralatan dan perlengkapan aparatur yang memadai, pemeliharaan kendaraan operasional, gedung kantor yang memadai;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)  
Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (program penunjang)  
Output dari program dan kegiatan ini adalah pembinaan aparatur, membangun kerja sama tim, membangun karakter dari aparatur
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum.  
Output dari program dan kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga masyarakat terdiri Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan lingkungan, Pemeliharaan RTH Kecamatan dan Pengecatan Kerb Bahu Jalan.
6. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan.  
Output dari program dan kegiatan ini adalah pelayanan administrasi kependudukan termasuk didalamnya penerbitan KTP dan kartu Keluarga dan Administrasi Kependudukan lainnya serta Pembinaan RT RW.



Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Pertama “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar”

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	DAMPAK BAIK/ KURANG
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.603.974.326	1.552.521.784	Air, Listrik, Telepon, Surat Kabar, Internet, STNK, Jasa Kbersihan Kantor, Pemeliharaan peralatan kantor, ATK, Cetakan dan Penggandaan, Alat listrik, Alat dan bahan pembersih, makan dan minum, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Baik
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		542.392.000	472.225.072	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, peralatan dan perlengkapan aparatur yang memadai, pemeliharaan kendaraan operasional, gedung kantor yang memadai	Baik
3	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		1.955.730.000	1.910.913.700	terpeliharanya sarana dan prasarana umum yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga masyarakat terdiri Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan lingkungan, Pemeliharaan RTH Kecamatan dan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Baik
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		101.063.632	48.042.500	pelayanan administrasi kependudukan termasuk dan Pembinaan RT RW	Baik



**Sasaran 2**

Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam**  
**keamanan dan kenyamanan lingkungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00	50	83.33	166.66

Sasaran **Meningkatnya** peran **kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan** dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : **Persentase Kelurahan Unggul** dengan formulasi % kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Astanaanyar.

- **Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 83.33 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 166.66 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	83.33	166.66

**- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini meningkat 66.66 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00	50	83.33	166.66

**- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.**

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 166.66 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Astanaanyar maka capaian kinerjanya mencapai 83.33 %.

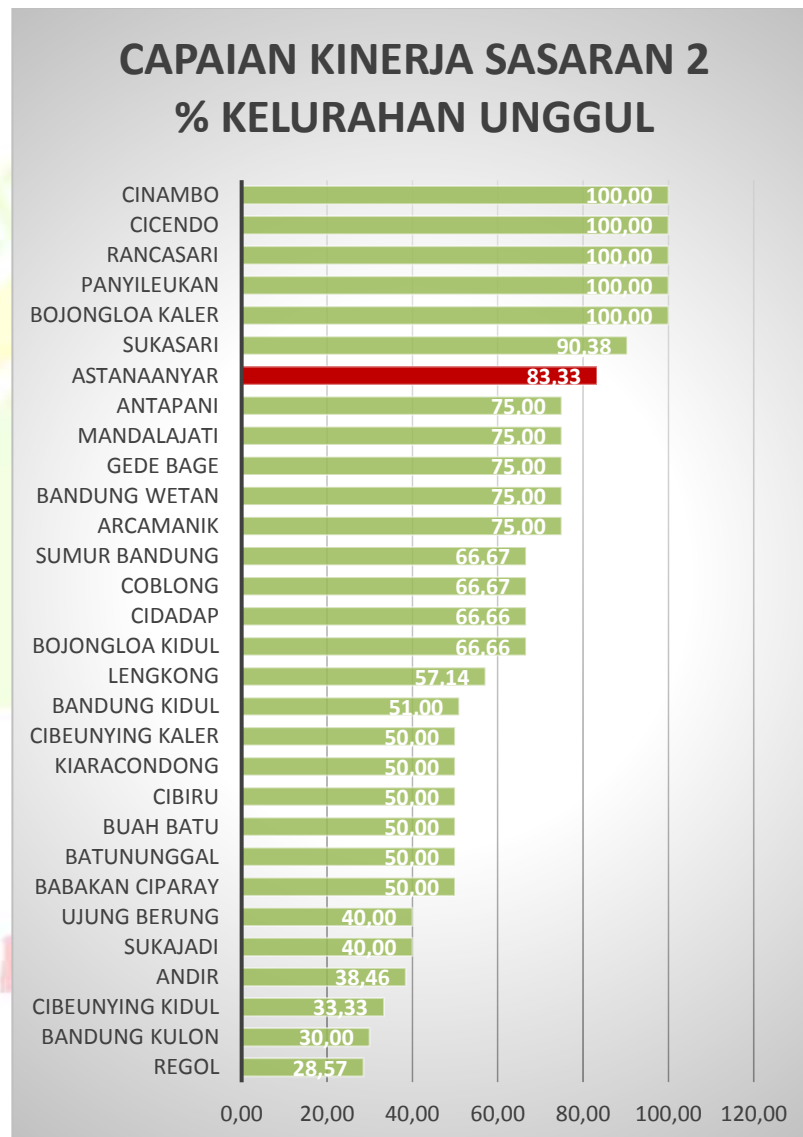
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Renstra Tahun 2023	%
			Target	Realisasi			
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,25	82.991	102.55	83	99,99

**- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.**

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu " adalah sebesar 82.991 dari target sebesar 82.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.90 % tidak diperbandingkan dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta karena keterbatasan data dan waktu dalam penyusunan laporan.

- **Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.**

Adapun capaian kinerja nyata indikator "**Persentase Kelurahan Unggul**" bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja “Persentase Kelurahan Unggul” di Kota Bandung yang tertinggi sebesar 100% pada 5 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Cinambo, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Panyileukan, dan Kecamatan Bojongloa Kaler. Kecamatan terendah sebesar 28.57% yaitu Kecamatan Regol. Capaian Kinerja

“Persentase Kelurahan Unggul” di Kecamatan Astanaanyar sebesar 83.33% dan berada pada urutan 7 dari jumlah 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator persentase kelurahan unggul disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA tahun berjalan.
2. Respon Masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan dan kecamatan di tanggap dengan cukup baik.

Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya pemahanan rancangan indikator kelurahan unggul
2. Masih kurangnya sinergitas antar kasi kelurahan dan kecamatan.

Solusi

1. Melakukan sosialisasi rancangan pembentukan kelurahan unggul kepada pejabat struktural kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam mendukung tercapainya kriteria kelurahan unggul di kecamatan astanaanyar terutama dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung program RPJMD.



- **Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Output program dan kegiatan yang berhubungan dengan **Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan** tersebut antara lain terbentuknya Satwankar; terbentuknya Kampung Siaga bencana; Pojok Baca/Taman Baca; Gerakan menyemarakkan Tempat Ibadah; Minimal 2 kader Jumantik tingkat Kelurahan; Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per kelurahan; Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (Tempat bermain anak); Seftictank Comunal; Bank sampah per kelurahan; menciptakan satu koperasi unggul tiap kelurahan (Pembentukan Satgas Anti Rentenir); Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara; pembentukan koperasi di tempat ibadah, siskamling aktif dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Kedua “Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan Astanaanyar”

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	DAMPAK BAIK/ KURANG
1	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		1.470.347.000	1.360.864.900		Baik
		Kegiatan Pemberdayaan KUMKM	3.596.000	2.590.000	menciptakan satu koperasi unggul tiap kelurahan (Pembentukan Satgas Anti Rentenir); terpelihara; pembentuka koperasi di tempat ibadah	



		Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	1.193.227.000	1.160.622.500	Pembentukan Satwankar, Siskamling Aktif	Baik
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	1.000.000	0.	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan	-
		Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial	223.720.000	151.0419.000	Minimal 2 kader Jumantik tingkat Kelurahan, Kampung Siaga Bencana	
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	48.804.000	46.233.400	Pelaksanaan Musrenbang	Baik

### Sasaran 3

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	54	54	100.00	59	61.33	103.95

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan dengan formulasi % Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif dibagi 3

**- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan" adalah

sebesar 61.33 dari target sebesar 59 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103.95 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	59	61.33	103.95

**- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan" tahun ini meningkat 3.95 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00	50	83.33	166.66

**- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.**

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan" tahun ini adalah sebesar 103.95 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Astanaanyar maka capaian kinerjanya mencapai 61.33 %

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Akhir Renstra Tahun 2023	%
			Target	Realisasi			
1	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,25	82.991	102.55	83	99,99

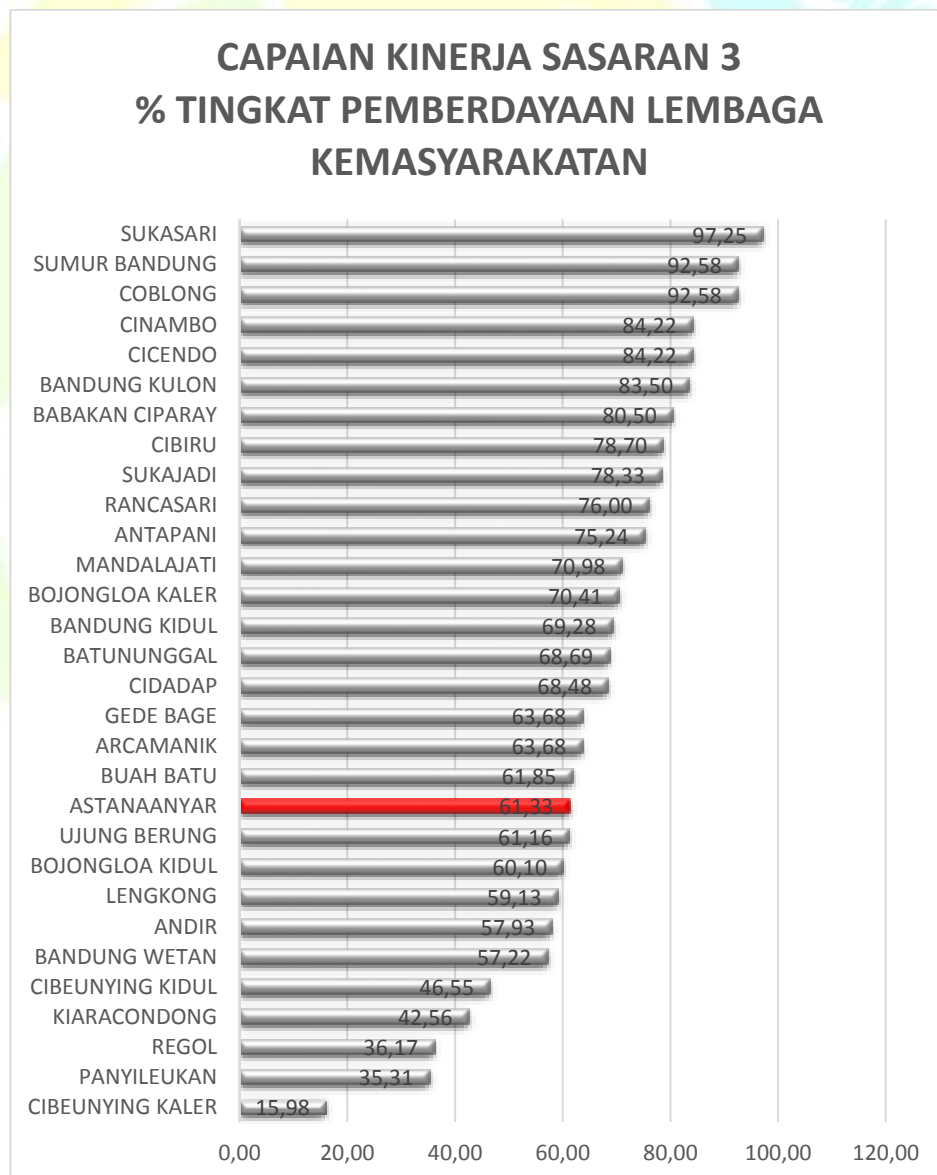
**- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.**

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu " adalah sebesar 82.991 dari target sebesar 82.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase

capaian kinerjanya adalah 100.90 % tidak diperbandingkan dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta karena keterbatasan data dan waktu dalam penyusunan laporan.

- **Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.**

Adapun capaian kinerja nyata indikator "**Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan**" bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut:





Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja **“Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan”** di Kota Bandung yang tertinggi sebesar 97.25% pada Kecamatan Sukasari dan Kecamatan terendah sebesar 15.98% yaitu Kecamatan Cibeunying Kaler. Capaian Kinerja **“Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan”** di Kecamatan Astanaanyar sebesar 61.33% dan berada pada urutan 20 dari jumlah 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Astanaanyar disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung :

1. Anggaran dan Swadaya murni masyarakat
2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Astanaanyar

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah
2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Astanaanyar
3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian
4. Masih kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap apatur di kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, RT dan RW;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Astanaanyar, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penetapan peraturan dan penganggaran yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal.
2. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Astanaanyar lebih ditingkatkan.
3. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian;

Melaksanakan lebih banyak sosialisasi dan pembinaan kepada Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, RT dan RW;

- **Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Output program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain

- RW Unggul

Minimal memenuhi salah satu metode pengolahan sampah berbasis masyarakat dan 50 % kegiatan anggaran pemberdayaan RW mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD Kota Bandung

- PKK Unggul,

Minimal memenuhi 60% kegiatan anggaran pemberdayaan PKK mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD Kota Bandung



- Karang Taruna Unggul

Minimal memenuhi 60% kegiatan anggaran pemberdayaan Karang Taruna mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD Kota Bandung

- LPM Unggul.

Minimal memenuhi 60% kegiatan anggaran pemberdayaan LPM mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD Kota Bandung

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran  
Ketiga “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat”

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	DAMPAK BAIK/ KURANG
1	Program Pemberdayaan Kewilayahan		2.726.037.150	2.468.158.250		
		Pemberdayaan Lingkup RW	1.982.790.800	1.837.793.750	47 RW	Baik
		Pemberdayaan Lingkup PKK	297.515.100	282.216.300	6 LKK	Baik
		Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	225.712.600	154.883.850	6 LKK	Baik
		Pemberdayaan Lingkup LPM	220.018.650	193.264.350	6 LKK	Baik



### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 21.873.930.319,64 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 10.860.067.211,01 yang merupakan komponen gaji dan tunjangan, serta Belanja Langsung (BL) Rp. 11.013.863.108,63 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 19.960.709.995,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 9.748.989.059,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 10.211.720.936,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91.25%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.913.220.324,64. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Sedangkan mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2020. Neraca Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung per 31 Desember 2019 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp.26.654.511.293,30 atau turun sebesar 3.84% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 27.718.480.931,00. Nilai aset sebesar Rp. 26.654.511.293,30 tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 20.230.518.863,00 aset tetap Rp. 25.997.470.239,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 636.796.899,30 sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas Rp. 26.654.511.293,00 terdiri dari : kewajiban sebesar Rp. 452.773.319,00, dan ekuitas sebesar Rp. (26.201.737.974),00.





**NERACA**  
**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
Urusan Pemerintahan : 4 - 05      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Fungsi Penunjang Lainnya Unit Organisasi : 4 - 05 - 17      Kecamatan Astananyar		
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara TK/TP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Pemediaan	30.244.155,00	13.905.077,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>30.244.155,00</b>	<b>13.905.077,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	6.035.737.000,00	6.035.737.000,00
Peralatan dan Mesin	6.751.092.776,00	6.751.092.776,00
Gedung dan Bangunan	19.971.905.131,00	19.971.905.131,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	235.648.300,00	235.648.300,00
Aset Tetap Lainnya	723.593.197,00	723.593.197,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.730.566.105,00)	(6.050.318.249,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>25.997.470.239,00</b>	<b>27.067.718.155,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Komitmen dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	636.796.899,30	636.796.899,30
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>636.796.899,30</b>	<b>636.796.899,30</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>26.654.511.293,30</b>	<b>27.718.480.931,30</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	453.773.319,00	1.246.934.089,00
Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	0,00

NERACA  
 Kecamatan Astananyar

Halaman 1 dari 2



<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Fungsi Penunjang Lainnya	
<b>Unit Organisasi</b> : 4.05.17	Kecamatan Astanaanyar	
<b>URAIAN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	452.773.319,00	1.246.934.089,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>452.773.319,00</b>	<b>1.246.934.089,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	26.201.737.974,30	26.471.546.842,30
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>26.654.511.293,30</b>	<b>27.718.480.931,30</b>

Adapun untuk realisasi belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18  
 Realisasi Anggaran BTL, BL dan Belanja Pemeliharaan  
 Kantor Kecamatan Astanaanyar  
 Tahun Anggaran 2020

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja Langsung	Relisasi Belanja	Belanja Pemeliharaan	%
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
17	Kecamatan Astanaanyar	10.860.067.211	1.011.050.000	8.043.426.496	1.157.244.440	11.013.863.108	19.960.709.995	531.716.540	91.25

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.19

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung  
Tahun 2020

NO	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.603.974.326</b>	<b>1.552.521.784</b>	<b>92.72</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	155.814.210	131.079.516	96.79
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.520.600	6.958.300	81.66
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.860.000	4.750.000	97.74
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.200.000	25.170.300	99.88
5	Penyediaan alat tulis kantor	232.771.216	222.427.418	95.56
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	225.249.400	223.500.850	99.22
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.022.800	14.886.600	99.09
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.200.000	2.156.000	98.00
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	35.874.300	35.761.035	99.68
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	22.880.000	20.839.000	91.08
10	Penyediaan makanan dan minuman	248.581.800	239.109.165	96.19
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15.000.000	13.883.600	92.56
12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	612.000.000	612.000.000	100.00
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>542.392.000</b>	<b>475.225.072</b>	<b>87.62</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	19.973.700	99.87
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	522.392.000	455.251.372	87.15
	<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	<b>101.062.632</b>	<b>48.042.500</b>	<b>47.54</b>
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	18.310.600	7.681.500	41.95
2	Kegiatan Pembinaan RT RW	82.752.032	40.361.000	48.77
	<b>Program Perlindungan Sosial Bencana</b>	<b>302.060.000</b>	<b>302.016.000</b>	<b>99.99</b>



1	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggal darurat dan kejadian luar biasa	302.060.000	302.016.000	99.99
	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>	<b>116.260.000</b>	<b>114.030.000</b>	<b>98.08</b>
1	Kegiatan Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	116.260.000	114.030.000	98.08
	<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>2.726.037.150</b>	<b>2.468.158.250</b>	<b>90.54</b>
1	Pemberdayaan Lingkup RW	1.982.790.800	1.837.793.750	92.69
2	Pemberdayaan Lingkup PKK	297.515.100	282.216.300	94.86
3	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	225.712.600	154.883.850	68.62
4	Pemberdayaan Lingkup LPM	220.018.650	193.264.350	87.84
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)</b>	<b>124.106.789</b>	<b>107.031.500</b>	<b>86.24</b>
1	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)	59.937.089	43.616.100	72.77
2	Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	44.900.100	44.257.800	98.57
3	Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)	19.269.600	19.157.600	99.42
	<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>1.470.347.000</b>	<b>1.360.864.900</b>	<b>92.55</b>
1	Kegiatan pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	3.596.000	2.590.000	72.02
2	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	1.193.227.000	1.160.622.500	97.27
3	Kegiatan Penguatan Kelembagaan swadaya masyarakat kewilayahan	1.000.000	0	0
4	Kegiatan Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial	223.720.000	151.419.000	67.68
5	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	48.804.000	46.233.400	94.73
	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	<b>1.955.730.000</b>	<b>1.910.913.700</b>	<b>97.71</b>
1	Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	1.942.229.700	1.897.628.200	97.70
2	Pemeliharaan RTH Kecamatan	12.670.000	12.460.000	98.34
3	Pengecatan Kerb Bahu Jalan	830.300	825.500	99.42
	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU)</b>	<b>2.071.893.210</b>	<b>1.872.917.230</b>	<b>90.40</b>
1	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)	1.113.270.300	958.985.940	86.14





2	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	148.843.400	147.012.800	98.77
3	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	683.914.310	648.974.290	94.89
4	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	125.865.200	117.944.200	93.71
<b>JUMLAH</b>		<b>21.873.930.319</b>	<b>19.960.709.995</b>	<b>91.25</b>

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Astanaanyar pada tahun 2020 sebesar 91.25% sudah cukup baik, hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dari aparatur Kecamatan Astanaanyar untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Adapun Pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Astanaanyar per sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.20

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung per sasaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	6.391.312.172	5.973.650.286	93.47
2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan Astanaanyar	1.586.607.000	1.474.894.900	92.96
3.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Astanaanyar	2.726.037.150	2.468.158.250	90.54
<b>Jumlah</b>		<b>10.703.956.322</b>	<b>9.916.703.436</b>	<b>92.65</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tahun 2020.

### Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi digunakan terhadap sasaran yang rata-rata capaian kinerjanya 100% atau lebih dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran. Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21

Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>Sasaran 1</b>	<b>2</b>	<b>102,11</b>	<b>5.973.650.286</b>	<b>93.47</b>
1	Melebihi/ melampaui target	1	50 %		
2	Sesuai target	1	50 %		
3	Tidak mencapai target	-	-		
<b>B.</b>	<b>Sasaran 2</b>	<b>1</b>	<b>100 %</b>	<b>1.474.894.900</b>	<b>92.96</b>
1	Melebihi/ melampaui target	1	100 %		
2	Sesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		
<b>C.</b>	<b>Sasaran 3</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>2.468.158.250</b>	<b>90.54</b>
1	Melebihi/ melampaui target	1	100 %		
2	Sesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		



Dilihat dari table diatas jumlah sasaran 1 yang melampaui target adalah sebanyak 1 indikator sedangkan yang mencapai target sebanyak 1 indikator dan yang tidak mencapai target tidak ada, rata-rata pencapaian sarasannya adalah 100.90% dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 93.47% dari anggaran yang tersedia maka dapat dikatakan tingkat efisiensi sasaran 1 adalah sebesar  $100.90\% - 93.47\% = 7.43\%$  sehingga pencapaian sasaran 1 cukup efektif dan efisien.

Jumlah sasaran 2 yang melampaui target sebanyak 1 indikator dan tidak ada yang sesuai target atau tidak mencapai target tidak ada, rata-rata pencapaian sarasannya adalah 166.66% dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 93.47% dari anggaran yang tersedia maka dapat dikatakan tingkat efisiensi sasaran 2 adalah sebesar  $166.66\% - 93.47\% = 73.2\%$  sehingga pencapaian sasaran 2 cukup efektif dan efisien.

jumlah sasaran 3 yang melampaui target sebanyak 1 indikator dan tidak ada yang sesuai target atau tidak mencapai target tidak ada, rata-rata pencapaian sarasannya adalah 103.95% dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 90.54% dari anggaran yang tersedia maka dapat dikatakan tingkat efisiensi sasaran 3 adalah sebesar  $103.95\% - 90.54\% = 13.41\%$  sehingga pencapaian sasaran 3 cukup efektif dan efisien.

Pencapaian Misi pada Tahun 2020 merupakan realisasi pencapaian kinerja tahun kedua Renstra 2018-2023, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (Satu) tahun sebagai berikut :





Tabel 3.22

Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Astanaanyar  
Kota Bandung Tahun 2020

No.	Sasaran	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-					Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)		
A.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	8.579.853.395	8.183.321.135	5.973.650.286				14.156.971.421	165.00
B.	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.445.248.464	3.949.414.215	1.474.894.900				5.424.309.115	122.02
C.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Astanaanyar	6.498.764.443	5.173.254.806	2.468.158.250				7.641.413.056	117.58

Secara umum efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan **efektif** dan **efisien** terhadap capaian kinerja misi organisasi.



### 3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

#### 1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1			

#### 2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1.			

#### 3. Prestasi Tingkat Kota Bandung dan Lainnya

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1.	Lomba Foto Buruan Sae	Juara 1	2020
2.			2020
3.			

AGAMIS  
AMANAH TERTIB



## **BAB IV**

# **PENUTUP**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.90 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 166.66 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.95 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 21.873.930.319,64 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 19.960.790.995,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.913.220.324,64

Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.90 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 166.66 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.95 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.211.720.936,00 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung adalah 91.25 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

**Bandung, Januari 2021**

**CAMAT ASTANAANYAR**



**Drs. SYUKUR SABAR**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19680904 199006 1 001**

**KERAMAT**  
**KREATIF RESPONSIF**  
**AGAMIS**  
**AMANAH TERTIB**